

**PERSEPSI GURU SMA PESERTA DIKLAT TENTANG
FUNGSI LPMP SUMBAR SEBAGAI LEMBAGA
PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN KOTA PADANG**

SKRIPSI

*Diajukan kepada Tim Penguji Skripsi Jurusan Ilmu Sosial Politik sebagai
salah satu persyaratan Guna memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan*



Oleh :

RIZA HASTUTI
TM/NIM : 2007/84633

PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

JURUSAN ILMU SOSIAL POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2011

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Persepsi Guru SMA Peserta Diklat tentang Fungsi LPMP Sumbar
Sebagai Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan
Di Kota Padang

Nama : Riza Hastuti
Nim : 2007/84633
Prodi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Jurusan : Ilmu Sosial Politik
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 03 September 2011

Disetujui Oleh

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Azwar Ananda, MA
NIP. 196107201986021001

Pembimbing II



Dra. Hj. Fitri Eriyanti, M.Pd, Ph.D
NIP. 196402081990032001

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

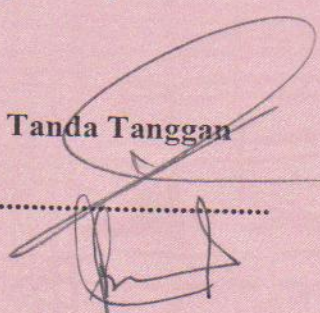
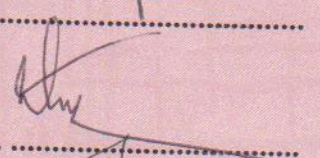
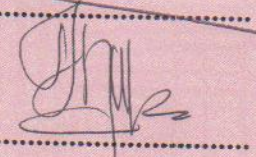
Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji Skripsi
Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial
Universitas negeri padang

Pada Hari Senin Tanggal 15 Agustus 2011 pukul 11.00 – 12.30 WIB

Judul : Persepsi Guru SMA Peserta Diklat Tentang Fungsi LPMP
Sumbar sebagai Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan
di Kota Padang

Nama : Riza Hastuti
Nim : 2007/84633
Prodi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Jurusan : Ilmu Sosial Politik
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 03 September 2011

Nama	Tim Penguji	Tanda Tangan
1. Ketua	: Prof. Dr. H. Azwar Ananda, MA	1..... 
2. Sekretaris	: Dra. Hj. Fitri Eriyanti, M.Pd, Ph.D	2..... 
3. Anggota	: Drs. Helmi Hasan, M.Pd	3..... 
4. Anggota	: Dr. Isnarmi, M.Pd, MA	4..... 

Mengesahkan :
Dekan FIS UNP

Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd
NIP. 196210011989031001

ABSTRAK

Riza Hastuti. TM/NIM : 2007/84633. Persepsi Guru SMA Peserta Diklat Tentang Fungsi LPMP Sumbar Sebagai Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Di Kota Padang.

Pembimbing I : Prof. Dr. H. Azwar Ananda, MA
Pembimbing II : Dra. Hj. Fitri Eriyanti, M.Pd, Ph.D

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan persepsi guru SMA peserta diklat tentang fungsi LPMP Sumbar sebagai Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan di Kota Padang yaitu (1) gambaran persepsi guru SMA peserta diklat tentang LPMP Sumbar sebagai Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan, (2) persepsi guru SMA peserta diklat tentang fungsi LPMP Sumbar sebagai Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan.

Jenis penelitian adalah deskriptif kuantitatif karena hanya menggambarkan/mendeskripsikan data apa adanya. Objek penelitian adalah guru SMA peserta diklat LPMP Sumbar di kota padang sebanyak 16 orang. Teknik Pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *Total Sampling*, dimana seluruh populasi dijadikan sampel penelitian.

Hasil penelitian menunjukan : (1) gambaran persepsi guru SMA peserta diklat tentang LPMP Sumbar sebagai Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan adalah baik dengan perolehan mean 4.1 dan TCR 81.9, (2) persepsi guru SMA peserta diklat tentang fungsi LPMP Sumbar sebagai Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan adalah baik dengan perolehan mean 4.0 dan TCR 80.8. Dapat di simpulkan bahwa persepsi guru SMA peserta diklat tentang fungsi LPMP Sumbar sebagai lembaga penjaminan mutu pendidikan di kota Padang adalah baik.

Jadi LPMP Sumbar sudah menjalankan fungsinya dengan baik di kota padang sebagai Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan dan diharapkan LPMP Sumbar juga dapat melakukan sosialisasi tentang fungsi, tugas pokok dan programnya baik yang sedang dan yang akan dilaksanakan kepada guru SMA di Kota Padang.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT karena rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Persepsi Guru SMA Peserta Diklat tentang Fungsi LPMP Sumbar Sebagai Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan di Kota Padang”**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

Terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. H. Azwar Ananda, MA sebagai pembimbing I dan Ibu Dra. Hj. Fitri Eriyanti, M.Pd, Ph.D sebagai pembimbing II, yang telah memberikan bantuan, ilmu pengetahuan, waktu, bimbingan dan masukan yang berguna bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah mendorong penulis untuk menyelesaikan studi dan skripsi ini

1. Dekan dan Pembantu Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
2. Bapak Drs. Yasril Yunus, M.Si sebagai Ketua Jurusan, Ibu Dra. Aina sebagai Sekretaris Jurusan, dan Koordinator skripsi Jurusan Ilmu Sosial Politik FIS Universitas Negeri Padang.
3. Bapak Drs. Syakwan Lubis sebagai Penasehat Akademik yang telah memberikan arahan dan nasehat.

4. Bapak Drs. Helmi Hasan, M.Pd, dan ibu Isnarmi, MPd, MA sebagai dosen penguji, atas semua saran, masukan, dan kritiknya selama penelitian dan penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen dan Karyawan Tata Usaha jurusan Ilmu Sosial Politik, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
6. Bapak Kepala LPMP Sumbar dan Kepala Sekolah SMA Di Kota Padang yang telah memberi izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
7. Ibunda Nurbaina, Ayahanda Amrin, kakaknda (Ardi.Z, Armen, Arnedi, Donal) dan adinda (Meri Amelia) serta keluarga besar yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan moril dan materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-teman dan semua pihak yang telah memberikan bantuan, semangat, dan dorongan demi kesempurnaan skripsi ini.

Semoga semua bantuan yang telah diberikan bernilai ibadah dan mendapat balasan dari Allah SWT dan skripsi ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya.
Amin.

Padang, September 2011

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah, Pembatasan dan Perumusan masalah	5
1. Identifikasi Masalah	5
2. Pembatasan Masalah	5
3. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	8
A. Kajian Teori	8
1. Persepsi	8
a. Pengertian Persepsi	8
b. Faktor yang Mempengaruhi Persepsi.....	10
2. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan	11
a. Pengertian Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan	11
b. Tugas pokok Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan.....	12

c. Fungsi Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan	12
d. Program Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan	13
3. Penjaminan Mutu Pendidikan	16
a. Pengertian Mutu Pendidikan	16
b. Karakteristik Mutu Pendidikan	18
c. Penjaminan Mutu Pendidikan	21
B. Kerangka Konseptual.	22
BAB III : METODE PENELITIAN.....	23
A. Jenis Penelitian.....	23
B. Variabel Penelitian.....	23
C. Populasi dan Sampel.	24
1. Populasi.....	24
2. Sampel.	25
D. Jenis, Sumber, Teknik dan Alat Pengumpulan Data.....	25
1. Jenis Data	25
2. Sumber Data.....	26
3. Teknik dan Alat Pengumpulan Data.	26
E. Teknik Analisis Data.....	27
BAB IV : TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	30
A. TEMUAN PENELITIAN	30
1. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Sumbar.....	30
a. Lokasi Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Sumbar	30

b. Sejarah Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP)	
Sumbar	30
c. Visi dan Misi Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP)	
Sumbar	32
d. Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Sumbar	33
e. Fasilitas Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP)	
Sumbar	34
2. Hasil Penelitian	37
a. Gambaran persepsi guru SMA peserta diklat tentang LPMP	
Sumbar sebagai Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan.....	38
b. Persepsi guru SMA Peserta Diklat tentang fungsi LPMP	
Sumbar Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan.....	47
B. PEMBAHASAN	56
1. Gambaran persepsi guru SMA peserta diklat tentang LPMP Sumbar	
sebagai Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan	56
2. Persepsi guru SMA peserta diklat tentang fungsi LPMP Sumbar	
sebagai Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan.....	62
BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN.....	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Jumlah guru SMA peserta diklat LPMP Sumbar di Kota Padang th 2011	24
2. Tingkat Pencapaian Responden	28
3.1 Distribusi data gambaran persepsi guru SMA peserta diklat tentang nama LPMP Sumbar	39
3.2 Distribusi data gambaran persepsi guru SMA peserta diklat tentang tugas pokok LPMP Sumbar	40
3.3 Distribusi data gambaran persepsi guru SMA peserta diklat tentang fungsi LPMP Sumbar	42
3.4 Distribusi data gambaran persepsi guru SMA peserta diklat tentang program LPMP Sumbar	45
4.1 Distribusi data gambaran persepsi guru SMA peserta diklat tentang fungsi pemetaan mutu pendidikan LPMP Sumbar	48
4.2 Distribusi data gambaran persepsi guru SMA peserta diklat tentang fungsi supervise satuan pendidikan LPMP Sumbar	50
4.3 Distribusi data gambaran persepsi guru SMA peserta diklat tentang fungsi fasilitasi peningkatan mutu pendidikan LPMP Sumbar	52
4.4 Distribusi data gambaran persepsi guru SMA peserta diklat tentang fungsi pengembangan dan pengelolaan system informasi pendidikan LPMP Sumbar	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Bagan kerangka konseptual.....	22

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Masalah pokok pendidikan yang selalu menjadi perhatian dari tahun ke tahun adalah mutu pendidikan, perluasan kesempatan pendidikan, relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat, dan efisiensi manajemen. Masalah mutu pendidikan ini tidak dapat dilepaskan dari kehidupan manusia karena merupakan kebutuhan yang sangat penting dalam hidupnya. Kebutuhan ini mengharuskan pemerintah untuk menciptakan pendidikan yang bermutu agar dapat melahirkan manusia yang berkualitas.

Peningkatan mutu pendidikan misalnya menjadi komitmen Departemen Pendidikan Nasional (yang sejak tahun 2009 berubah nama menjadi Kementerian Pendidikan Nasional) yang di tunjukan dengan di bentuknya Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan (PMPTK) yang pada dasarnya bertujuan untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya bagi kemajuan pendidikan di Indonesia serta meningkatkan kualitas pendidikan secara efektif dan efisien. Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan tersebut, pemerintah telah melakukan berbagai usaha yang meliputi peningkatan di berbagai bidang di antaranya penyempurnaan kurikulum, penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sistem pengajaran dan peningkatan kemampuan guru melalui berbagai bentuk pendidikan dan pelatihan.

Peningkatan kemampuan guru dalam berbagai bentuk Pendidikan dan pelatihan (diklat) hanyalah salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Pemberian pendidikan dan pelatihan (diklat) ini bertujuan agar guru tidak ketinggalan dengan perkembangan pendidikan terjadi dan pada akhirnya akan meningkatkan mutu pendidikan. Lembaga yang berwenang dalam melaksanakan pendidikan dan pelatihan (diklat) ini harus berupaya semaksimal mungkin agar pelaksanaan diklat mempunyai tujuan, manfaat dan sasaran yang tepat bagi peningkatan mutu pendidikan.

Salah satu lembaga yang mempunyai fungsi dalam melaksanakan peningkatan mutu pendidikan melalui pelaksanaan berbagai bentuk pendidikan dan pelatihan (diklat) kepada guru adalah Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) yang merupakan unit pelayanan teknis pusat yang mempunyai tugas melaksanakan penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah pada jalur pendidikan formal di provinsi berdasarkan kebijakan menteri pendidikan nasional. Hal ini terdapat dalam pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 7 Tahun 2007 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan yang salah satunya adalah Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) sumbar. LPMP Sumbar ini merupakan lembaga yang bertugas dalam melaksanakan penjaminan mutu pendidikan di Sumatera Barat yaitu melalui pendidikan dan pelatihan (diklat) yang di berikan kepada guru.

Berdasarkan Permen Diknas No 66 Tahun 2008 dalam menjalankan tugasnya, LPMP Sumbar memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Pemetaan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah pada jalur pendidikan formal.
2. Supervisi satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah pada jalur pendidikan formal dalam penjaminan mutu pendidikan nasional.
3. Fasilitasi peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah pada jalur pendidikan formal.
4. Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi mutu pendidikan dasar dan menengah termasuk Taman Kanak-kanak/TK, Raudhatul Athfal/RA, atau bentuk lain yang sederajat.
5. Pelaksanaan urusan administrasi Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP).

Dari fungsi LPMP Sumbar diatas dan sebagai satu-satunya lembaga penjaminan mutu pendidikan yang ada di Sumatera Barat, LPMP Sumbar mempunyai fungsi yang sangat penting dalam meningkatkan mutu pendidikan. Peningkatan mutu pendidikan ini merupakan tugas yang harus dilaksanakan LPMP Sumbar sebagai lembaga penjaminan mutu pendidikan. Jadi pada dasarnya LPMP Sumbar berfungsi sebagai alat, tempat yang membantu guru dalam melaksanakan peningkatan kemampuan guru yang pada prinsip utamanya adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui berbagai bentuk pendidikan dan pelatihan. Fungsi LPMP Sumbar sebagai lembaga penjaminan mutu pendidikan

merupakan fungsi yang sangat penting dalam meningkatkan mutu pendidikan, dimana yang menjadi sasaran utamanya adalah meningkatkan mutu guru yang pada akhirnya melihat hasil belajar siswa.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan guru SMA peserta diklat di Kota Padang yaitu dengan bapak Drs. Masri luna, M.Pd (guru SMAN 7 Padang) dan bapak A. Busrul, S.Pd (guru SMA Adabiah Padang) mengenai LPMP Sumbar, fungsi LPMP Sumbar sebagai lembaga penjaminan mutu pendidikan di nilai belum terlaksana dengan baik dan keberadaan LPMP Sumbar kurang dirasakan oleh guru-guru, kemudian guru-guru belum mamahami secara jelas fungsi LPMP sebagai lembaga penjaminan mutu pendidikan di kota Padang.

Dari hasil wawancara tersebut, dapat dilihat bahwa keberadaan dan fungsi LPMP Sumbar sebagai lembaga penjaminan mutu pendidikan (LPMP) Sumbar belum di ketahui guru secara jelas di Kota Padang seperti yang diamatkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 66 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan.

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka pada kesempatan ini penulis memfokuskan penelitian dengan judul **“Persepsi Guru SMA Peserta Diklat Tentang Fungsi LPMP Sumbar Sebagai Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) di Kota Padang”**.

B. IDENTIFIKASI, PEMBATASAN DAN PERUMUSAN MASALAH

1. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan sebelumnya, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

- a. Keberadaan LPMP Sumbar sebagai Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan.
- b. LPMP Sumbar belum melaksanakan fungsinya secara optimal.
- c. Belum diketahui secara jelas fungsi LPMP Sumbar sebagai lembaga penjaminan mutu pendidikan.

2. PEMBATASAN MASALAH

Dari identifikasi masalah di atas, maka dibutuhkan suatu kesimpulan yang tepat dan jelas, oleh karena itu perlu dibatasi permasalahan yang akan diteliti. Untuk itu peneliti membatasi masalah yaitu sebagai berikut :

- a. Keberadaan LPMP Sumbar sebagai lembaga penjaminan mutu pendidikan.
- b. Fungsi LPMP Sumbar sebagai lembaga penjaminan mutu pendidikan.

3. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka penulis merumuskan masalah penelitian yaitu:

- a. Bagaimana persepsi guru SMA tentang keberadaan LPMP Sumbar sebagai lembaga penjaminan mutu pendidikan ?
- b. Bagaimana persepsi guru SMA tentang fungsi LPMP Sumbar sebagai lembaga penjaminan mutu pendidikan di kota Padang?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan yang ingin dilihat dari penelitian ini adalah untuk mengetahui :

- a. Persepsi guru SMA tentang keberadaan LPMP Sumbar sebagai lembaga penjaminan mutu pendidikan di kota Padang.
- b. Persepsi guru SMA tentang fungsi LPMP Sumbar sebagai lembaga penjaminan mutu pendidikan di Kota Padang.

D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat dilaksanakan penelitian ini adalah :

1. Manfaat teoritis

Dengan penulisan ini dapat memberikan pengembangan ilmu pendidikan dalam bidang peningkatan mutu pendidikan terutama mengenai fungsi LPMP sebagai lembaga penjaminan mutu pendidikan.

2. Manfaat praktis

a. Pemerintah

Agar tulisan ini bermanfaat dan dapat dijadikan bahan masukan bagi pemerintah khususnya Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) dalam peningkatan mutu pendidikan.

b. Guru

Memberikan informasi kepada guru tentang fungsi Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Sumbar sebagai lembaga penjaminan mutu pendidikan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. KAJIAN TEORITIS

1. Persepsi

a. Pengertian Persepsi

Persepsi berasal dari bahasa Inggris yaitu "*perception*" yang berarti sebagai tanggapan atau daya memahami atau menanggapi sesuatu. Pengertian persepsi ini sama dengan yang dikemukakan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (1994:562) bahwa persepsi adalah opini, tanggapan, anggapan terhadap sesuatu atau suatu kejadian.

Menurut Slameto (1998: 104), menyatakan bahwa persepsi adalah proses yang menyangkut masuknya pesan atau informasi ke dalam otak manusia melalui persepsi manusia, terus menerus mengadakan hubungan dengan lingkungan. Hubungan itu dilakukan lewat inderanya penglihatan, pendengaran, perabaan, dan penciuman. Selanjutnya De Vito, 1997 (dalam Alex Sobur:2009: 445) mengatakan bahwa persepsi adalah proses ketika kita menjadi sadar akan banyaknya stimulus yang memengaruhi indera kita

Dari pengertian yang dikemukakan di atas menekankan pada proses memberikan opini, tanggapan, anggapan, dan menginterpretasikan yang diterima melalui indera penglihatan, pendengaran, perabaan dan penciuman kemudian menyadarinya sebagai sesuatu yang memengaruhi indera tersebut dalam lingkungan.

Lebih luas persepsi menurut Walgito (2002: 69) adalah proses yang terjadi di dalam diri individu yang dimulai dengan diterimanya rangsang, sampai rangsang itu disadari dan dimengerti oleh individu sehingga individu dapat mengenali dirinya sendiri dan keadaan di sekitarnya. Selanjutnya persepsi menurut Pareek 1996 (dalam Alex Sobur:2009: 446) adalah proses menerima, menyeleksi, mengorganisasikan, mengartikan, menguji, dan memberikan reaksi kepada rangsangan pancaindera atau data.

Melihat pengertian di atas dapat diketahui bahwa persepsi tersebut menjelaskan proses yang terjadi pada individu dalam menerima, menyeleksi, mengorganisasikan, mengartikan, menguji, dan memberikan reaksi berupa opini, tanggapan, dan anggapan terhadap rangsangan dan objek yang diamatinya.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat diambil kesimpulan bahwa persepsi adalah pendapat, pandangan, penilaian, dan tanggapan seseorang secara sadar terhadap suatu objek atau peristiwa yang telah tersimpan dalam pikirannya berdasarkan pengalaman, pengetahuan serta proses mendidik dan melalui tanggapan tersebut akan mempengaruhi terhadap kenyataan yang ada.

Begitu pula halnya dengan persepsi guru SMA peserta diklat tentang fungsi LPMP sebagai Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan di Kota Padang. Dengan mengetahui anggapan, pandangan serta penilaian guru SMA peserta diklat tentang fungsi LPMP sebagai Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan di Kota Padang maka akan dapat diketahui persepsi guru SMA peserta diklat

tentang fungsi LPMP sebagai Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan di Kota Padang

b. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Persepsi

Persepsi dari masing-masing individu dapat berbeda-beda, hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yang berasal dari dalam diri individu seperti perhatiannya, ingatan, intelegensi, pengetahuan, pemahaman, sikap dan kebudayaannya. Sedangkan faktor yang berasal dari luar dirinya seperti kondisi dari lingkungan, pendidikan yang diterimanya dan pengetahuan.

Selanjutnya Irwanto (1997) mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi meliputi : (1) perhatian yang selektif dalam kehidupan manusia. Setiap orang akan menerima banyak sekali rangsangan dari lingkungannya, meskipun demikian dia tidak harus menanggapi semua rangsangan yang diterimanya, (2) ciri-ciri rangsangan yang bergerak diantara rangsangan yang diam akan lebih menarik perhatian demikian juga dengan rangsangan yang paling besar diantara yang kecil dan yang kontras dengan latar belakang dan intensitas rangsangannya paling kuat, (3) nilai-nilai dan kebudayaan hidup (4) pengalaman terdahulu, yang sangat mempengaruhi seseorang mentafsirkan dunianya.

Faktor-faktor yang dikemukakan diatas dapat mempengaruhi persepsi seseorang, karena pada dasarnya setiap orang memiliki latar belakang pengalaman, kehidupan dan kebudayaan masing-masing, sehingga menyebabkan persepsi seseorang belum tentu sama dengan orang lain.

Dari beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa banyak sekali hal yang dapat menyebabkan perbedaan persepsi seseorang terhadap suatu objek atau peristiwa yang diamatinya, baik itu yang berasal dari dalam seperti kecerdasan, emosional, dan minat maupun yang berasal dari lingkungan seperti kebudayaan dan latar belakang sosial ekonomi.

2. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP)

a. Pengertian Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP)

Lembaga penjaminan mutu pendidikan yaitu unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan Nasional yang bertugas sebagai penyelenggara satuan atau program pendidikan untuk menaikkan tingkat kecerdasan kehidupan bangsa melalui pendidikan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menyatakan bahwa LPMP adalah unit pelaksana teknis departemen yang berkedudukan di provinsi dan bertugas untuk membantu pemerintah daerah dalam bentuk supervisi, bimbingan, arahan, saran, dan bantuan teknis kepada satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah serta pendidikan non formal, dalam berbagai upaya penjaminan mutu satuan pendidikan untuk mencapai standar nasional pendidikan.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 66 Tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) menyatakan bahwa Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) adalah unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan Nasional di bidang penjaminan

mutu pendidikan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Nasional.

b. Tugas Pokok Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP)

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan dinyatakan bahwa LPMP mempunyai tugas yaitu melaksanakan penjaminan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah pada jalur pendidikan formal di provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Pendidikan Nasional.

c. Fungsi Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP)

Dalam melaksanakan tugas pokok diatas, LPMP menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut :

- 1) Pemetaan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah pada jalur pendidikan formal.
- 2) Supervisi satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah pada jalur pendidikan formal dalam penjaminan mutu pendidikan nasional.
- 3) Fasilitasi peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah pada jalur pendidikan formal dalam penjaminan mutu pendidikan nasional.

- 4) Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi mutu pendidikan dasar dan menengah termasuk TK (Taman Kanan-kanak), RA (Raudhatul Athfal), atau bentuk lain yang sederajat, dan
- 5) Pelaksanaan urusan administrasi Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP).

d. Program Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Sumbar

Berdasarkan fungsi LPMP diatas dan mengacu pada Permen Diknas No 7 Tahun 2007 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan, LPMP Sumbar mempunyai program sebagai berikut :

- 1) Pemetaan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah pada jalur pendidikan formal, dengan program yaitu :
 - (a) Uji Kompetensi Guru Mata Pelajaran
 - (b) Seleksi Calon Kepala Sekolah/Pengawas
 - (c) Analisis Ujian Nasional
 - (d) Uji Kompetensi Siswa
 - (e) Lomba Guru, Pengawas, Kepala Sekolah Berprestasi
 - (f) Lomba Mengajar
 - (g) Lomba Menggambar dan Melukis

- 2) Supervisi satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah pada jalur pendidikan formal dalam penjaminan mutu pendidikan nasional, dengan program yaitu :
 - (a) Monitoring ke kabupaten/kota yang di tunjuk.
 - (b) Pemantauan ujian nasional.
 - (c) Monitoring peningkatan mutu pendidikan ke Kabupaten atau Kota yang di tunjuk.

- 3) Fasilitasi peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah pada jalur pendidikan formal dalam penjaminan mutu pendidikan nasional, dengan program yaitu :
 - (a) Peningkatan Kompetensi guru TK/SD/SLTP/SLTA meliputi:
Peningkatan Kompetensi Guru PAUD/TK, Peningkatan Kompetensi Guru Kelas SD, Peningkatan Kompetensi Guru Penjas, Peningkatan Kompetensi Tutor Paket A, B, dan C, Peningkatan Kompetensi Guru Mata Pelajaran
 - (b) Peningkatan Kompetensi Pengawas dan Kepala Sekolah
 - (c) Diklat Matematika Realistik
 - (d) Diklat Bahasa Asing Inggris/Jepang/Jerman)
 - (e) Diklat Lesson Study
 - (f) Diklat Penggunaan Alat Peraga/Labor
 - (g) Diklat Penelitian Tindakan Kelas/Penulisan Karya Ilmiah
 - (h) Diklat Penyusunan KTSP

- (i) Pendampingan KKG/MGMP/KKKS/ KKPS/MKKS/ MKPS
- (j) Forum Ilmiah Guru
- (k) Peningkatan Mutu Persekolahan (SNBI/Sekolah Binaan)
- (l) Pengembangan Nilai-Nilai Pendidikan INS Kayutanam
- (m)Penulisan *Best Practices* Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- (n) Bimbingan Karya tulis Ilmiah
- (o) Kemitraan dengan Dinas Pendidikan Kab/Kota dan instansi lain dalam peningkatan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

- 4) Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi mutu pendidikan dasar dan menengah termasuk TK (Taman Kanan-kanak), RA (Raudhatul Athfal), atau bentuk lain yang sederajat dengan program yaitu :
 - (a) Pengembangan sistem informasi mutu pendidikan dasar.
 - (b) Pengembangan sistem informasi mutu pendidikan menengah.
 - (c) Pengembangan sistem informasi mutu TK atau RA dan bentuk lain yang sederajat.

3. Penjaminan Mutu Pendidikan

a. Pengertian Mutu Pendidikan

Sebelum melihat pengertian mutu pendidikan terlebih dahulu harus diketahui pengertian mutu. Kata mutu memiliki konotasi yang bermacam-macam tergantung orang yang memakainya. Mutu berasal dari bahasa latin yakni “Qualis” yang berarti *what kind of* (tergantung kata apa yang mengikutinya). Kemudian Deming dalam Husaini Usman (2006: 407) mutu adalah kesesuaian dengan kebutuhan sedangkan menurut Juran dalam Husaini Usman (2006: 407) mutu adalah kecocokan dengan kebutuhan. Jadi mutu adalah kesesuaian dan kecocokan sesuatu dengan kebutuhan atau yang diinginkan.

Lebih lanjut Sallis dalam Husaini Usman (2006 : 408) mengemukakan mutu adalah konsep yang absolut dan relatif. Mutu yang absolut ialah mutu yang idealismenya tinggi dan harus dipenuhi, berstandar tinggi, dengan sifat produk bergengsi tinggi. Mutu yang relatif bukanlah sebuah akhir, namun sebagai sebuah alat yang telah ditetapkan atau jasa dinilai, yaitu apakah telah memenuhi standar yang telah ditetapkan. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa mutu adalah kesesuaian dan kecocokan sesuatu dengan kebutuhan yang mempunyai standar yang telah ditetapkan untuk dipenuhi.

Kemudian Depdiknas (2001) mengemukakan paradigma mutu dalam konteks pendidikan, mencakup *input*, proses, dan *output* pendidikan. Lebih jauh dijelaskan bahwa *input* pendidikan adalah segala sesuatu yang harus tersedia karena dibutuhkan untuk berlangsungnya proses, yang dimaksud

sesuatu adalah berupa sumberdaya dan perangkat lunak serta harapan-harapan sebagai pemandu bagi keberlangsungan proses. Input sumberdaya meliputi sumberdaya manusia (seperti ketua, dosen, konselor, peserta didik) dan sumberdaya selebihnya (peralatan, perlengkapan, uang bahan-bahan, dan sebagainya). Sedangkan *input* perangkat meliputi: struktur organisasi, peraturan perundang-undangan, deskripsi tugas, rencana, program, dan lain sebagainya. *Input* harapan-harapan berupa visi, misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Kesiapan input sangat diperlukan agar proses dapat berlangsung dengan baik. Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa tinggi rendahnya mutu *input* dapat diukur dari tingkat kesiapan input, makin tinggi kesiapan *input*, makin tinggi pula mutu *input* tersebut. Proses pendidikan merupakan proses berubahnya sesuatu menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang berpengaruh terhadap berlangsungnya proses disebut *input*, sedangkan sesuatu dari hasil proses disebut *output*. Proses dikatakan bermutu tinggi apabila pengkoordinasian dan penyerasian serta pemanduan input dilakukan secara harmonis, sehingga mampu menciptakan situasi pembelajaran yang menyenangkan (*enjoyable learning*), mampu mendorong motivasi dan minat belajar, dan benar-benar mampu memberdayakan peserta didik.

Selanjutnya pengertian pendidikan, kalau ditinjau dari segi asal kata, pendidikan itu berasal dari kata “*Pedagogi*” yang berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu : *Paid* artinya anak dan *Agagos* artinya membimbing. Jadi dapat diartikan cara atau ilmu untuk mengajar/membimbing anak. Kemudian menurut kamus besar bahasa Indonesia (1991:232) Pendidikan berasal dari kata

“*didik*”, Lalu kata ini mendapat awalan kata “*me*” sehingga menjadi “*mendidik*” artinya memelihara dan memberi latihan. Dalam memelihara dan memberi latihan diperlukan adanya ajaran, tuntutan dan pimpinan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran.

Berdasarkan UU no 20 tahun 2003 pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Dengan demikian dapat diartikan bahwa pendidikan itu adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan dan mengembangkan potensi peserta didik agar memiliki klah dan keterampilan yang di perlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.

Jadi dapat diartikan bahwa mutu pendidikan adalah kesesuaian dan kecocokan dari usaha sadar dan terencana yang bertujuan untuk mewujudkan dan mengembangkan potensi peserta didik agar memiliki akhlak dan keterampilan yang di perlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.

b. Karakteristik Mutu Pendidikan

Menurut Husaini Usman (2006 : 411) mengemukakan 13 (tiga) belas karakteristik yang dimiliki oleh *mutu pendidikan* yaitu :

- 1) Kinerja (performa) yakni berkaitan dengan aspek fungsional sekolah meliputi : kinerja guru dalam mengajar baik dalam memberikan penjelasan meyakinkan, sehat dan rajin mengajar, dan menyiapkan

bahan pelajaran lengkap, pelayanan administratif dan edukatif sekolah baik dengan kinerja yang baik setelah menjadi sekolah vaforit

- 2) Waktu wajar (timelines) yakni sesuai dengan waktu yang wajar meliputi memulai dan mengakhiri pelajaran tepat waktu, waktu ulangan tepat.
- 3) Handal (reliability) yakni usia pelayanan bertahan lama. Meliputi pelayanan prima yang diberikan sekolah bertahan lama dari tahun ke tahun, mutu sekolah tetap bertahan dan cenderung meningkat dari tahun ke tahun.
- 4) Data tahan (durability) yakni tahan banting, misalnya meskipun krisis moneter, sekolah masih tetap bertahan
- 5) Indah (aesteties) misalnya eksterior dan interior sekolah ditata menarik, guru membuat media-media pendidikan yang menarik.
- 6) Hubungan manusiawi (personal interface) yakni menunjung tinggi nilai-nilai moral dan profesionalisme. Misalnya warga sekolah saling menghormati, demokrasi, dan menghargai profesionalisme.
- 7) Mudah penggunaanya (easy of use) yakni sarana dan prasarana dipakai. Misalnya aturan-aturan sekolah mudah diterapkan, buku-buku perpustakaan mudah dipinjam di kembalikan tepat waktu.
- 8) Bentuk khusus (feature) yakni keunggulan tertentu misalnya sekolah unggul dalam hal penguasaan teknologi informasi (komputerisasi).

- 9) Standar tertentu (conformance to specification) yakni memenuhi standar tertentu. Misalnya sekolah telah memenuhi standar pelayanan minimal.
- 10) Konsistensi (consistency) yakni kejengalan, konstan dan stabil, misalnya mutu sekolah tidak menurun dari dulu hingga sekarang, warga sekolah konsisten dengan perkataannya.
- 11) Seragam (uniformity) yakni tanpa variasi, tidak tercampur. Misalnya sekolah melaksanakan aturan, tidak pandang bulu, seragam dalam berpakaian.
- 12) Mampu melayani (serviceability) yakni mampu memberikan pelayanan prima. Misalnya sekolah menyediakan kotak saran dan saran-saran yang masuk mampu dipenuhi dengan baik sehingga pelanggan merasa puas.
- 13) Ketepatan (accuracy) yakni ketepatan dalam pelayanan misalnya sekolah mampu memberikan pelayanan sesuai dengan yang diinginkan pelanggan sekolah.

c. Penjaminan Mutu Pendidikan

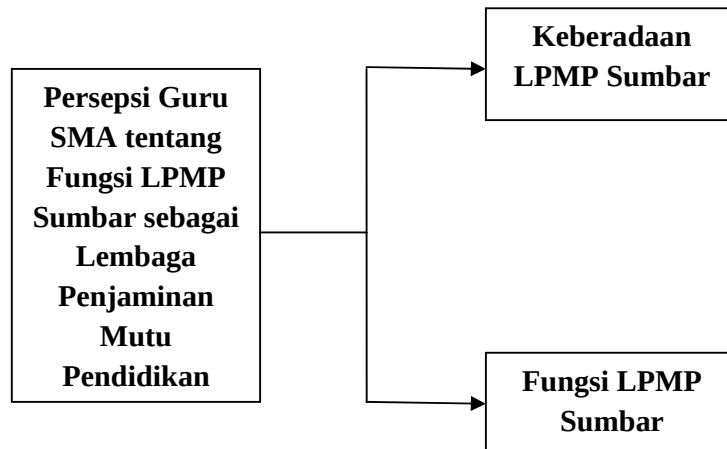
Berdasarkan Permen Diknas No 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Pasal 1 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa

1. Mutu pendidikan adalah tingkat kecerdasan kehidupan bangsa yang dapat diraih dari penerapan Sistem Pendidikan Nasional.
2. Penjaminan mutu pendidikan adalah kegiatan sistemik dan terpadu oleh satuan atau program pendidikan, penyelenggara satuan atau program pendidikan, pemerintah daerah, Pemerintah, dan masyarakat untuk menaikkan tingkat kecerdasan kehidupan bangsa melalui pendidikan.

Kemudian pasal 2 Permen Diknas No 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan menyatakan bahwa :

- 1) Tujuan akhir penjaminan mutu pendidikan adalah tingginya kecerdasan kehidupan manusia dan bangsa sebagaimana dicita-citakan oleh Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dicapai melalui penerapan SPMP.
- 2) Tujuan antara penjaminan mutu pendidikan adalah terbangunnya SPMP termasuk:
 - terbangunnya budaya mutu pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal;
 - pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas dan proporsional dalam penjaminan mutu pendidikan formal dan/atau nonformal pada satuan atau program pendidikan, penyelenggara satuan atau program pendidikan, pemerintah kabupaten atau kota, pemerintah provinsi, dan Pemerintah;
 - ditetapkannya secara nasional acuan mutu dalam penjaminan mutu pendidikan formal dan/atau nonformal;
 - terpetakannya secara nasional mutu pendidikan formal dan nonformal yang dirinci menurut provinsi, kabupaten atau kota, dan satuan atau program pendidikan;
 - terbangunnya sistem informasi mutu pendidikan formal dan nonformal berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal, terpadu, dan tersambung yang menghubungkan satuan atau program pendidikan, penyelenggara satuan atau program pendidikan, pemerintah kabupaten atau kota, pemerintah provinsi, dan Pemerintah.

B. KERANGKA KONSEPTUAL



Gambar 1. Kerangka Konseptual

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di kemukakan sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan terhadap persepsi guru SMA peserta diklat tentang fungsi LPMP Sumbar sebagai lembaga penjaminan mutu pendidikan di kota padang adalah sebagai berikut :

1. Gambaran persepsi guru SMA peserta diklat tentang LPMP sumbar sebagai Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan di kota padang memberikan tanggapan cukup baik dengan perolehan mean 4.1 dan TCR 81.9. Dapat di artikan bahwa guru SMA peserta diklat di Kota Padang sudah tahu dan paham tentang nama, tugas pokok, fungsi dan program-program LPMP Sumbar sebagai lembaga penjaminan mutu pendidikan. Jadi keberadaan LPMP sebagai lembaga penjaminan mutu pendidikan sudah di rasakan oleh guru SMA di kota Padang.
2. Persepsi guru SMA peserta diklat tentang fungsi LPMP Sumbar sebagai lembaga penjaminan mutu pendidikan yaitu fungsi pemetaan mutu pendidikan, supervisi satuan pendidikan, fasilitasi peningkatan mutu pendidikan dan pengembangan sistem informasi pendidikan memberikan tanggapan baik dengan perolehan mean 4 dan TCR 81. Dapat di artikan bahwa guru SMA peserta diklat di kota Padang sudah memahami dan

merasakan pelaksanaan fungsi LPMP Sumbar sebagai lembaga penjaminan mutu pendidikan di kota padang.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang di peroleh, maka penulis hanya dapat memberikan saran sebagai berikut :

- 1) Sebaiknya Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Sumbar dapat menjalankan fungsinya dengan baik sebagai lembaga penjaminan mutu pendidikan agar peningkatan mutu pendidikan yang diharapkan dapat terwujud.
- 2) Sebaiknya Lembaga penjaminan Mutu pendidikan (LPMP) Sumbar dapat mensosialisasikan tugas pokok, peranan dan program-program yang sedang dan akan dilaksanakan kepada guru-guru SMA di kota Padang agar guru SMA mengetahui secara jelas fungsi LPMP Sumbar sebagai lembaga yang mempunyai peran penting dalam melaksanakan penjaminan mutu pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Agusvidar nasution. 1992. *Bagaimana Cara Melakukan Penelitian Yang Efektif Dan Efisien*. Padang: FIP UNP
- Depdiknas. 2001. *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah. Buku1 , Konsep dan pelaksanaan*. Jakarta: Balitbang. Depdiknas. h. 4
- Hari Suderadjat. 2005. *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah; Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Implementasi KBK*. Bandung : Cipta Lekas Garafika
- Husaini Usman. 2006. *Manajemen Teori, Praktek Dan Riset Pendidikan*. Jakarta : Bumi Aksara
- Irwanto,dkk. 1997. *Psikologi Umum*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Juran, J.M. 1995. *Merancang Mutu*, Terjemahan Bambang Hartono dari Juran On *Quality By Design*, Jakarta: PT. Pustaka Binawan Pressindo
- Mungin Eddy Wibowo. 2001. *Paradigma Bimbingan dan Konseling*. Semarang: DEPDIKNAS. hlm 2
- Slameto. 1998. *Belajar Dan Faktor-faktor Yang Mempengaruhinya*. Jakarta: Rineka Cipta
- Sobur, Alex. 2009. *Psikologi Umum*. Bandung: Pustaka Setia
- Sudjana. 2005. *Metoda Statistika*. Bandung : Tarsito
- Suharsimi Arikunto. 2006. *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Bina Aksara
- Purwanto, Ngalim. 2008. *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya